

Kurangnya Komitmen Negara dan Organisasi Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Albino di Tanzania

Diah Ayu Vivit Nurfa'idah

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: dafa.yuvi@gmail.com

Abstract

Cases of violence and killings Albino in Tanzania attract public attention domestically and internationally. Tanzania percentage reaches 93% related to a culture of witchcraft belief, curses, demonic power and so forth. The strong cultural belief in witchcraft lead to acceptance of the advocacy NGO and INGO unobstructed. Tanzania occupies the top position in the sub-Saharan Africa as the country with the highest murder rate Albino. Such conditions do not necessarily make the Tanzanian government stayed silent as does the government's efforts to protect the Albino by improving the security and legal justice. The response given by the government of Tanzania considered slow by some international organizations and non-governmental organizations, so there is advocacy of some international organizations both governmental and non-governmental to perform humanitarian and justice towards Albino. But still, the problem Albino killings occurred despite existing international advocacy organizations and actions of the government in the form of prohibition and punishment of Albino killings. Referring to the background issues that the author submitted, the research question posed is why it is still going on Albino killings in Tanzania despite existing advocacy and the role of government. This study describes the cause is still the Albino killings in Tanzania using the concept of agenda setting synthesis, legitimacy, advocacy, and domestic constituencies. The concepts synthesizing get two of hypothesis, first, the lack of international legitimacy related to the issue of violence Albino in Tanzania. Second, government movements were hampered by the interests of domestic constituencies.

Therefore, this study describes the efforts that have been made either by the government or international organizations to stop violence and killing of Albino in Tanzania. This study describes how the legitimacy of international organizations and the interests of domestic constituencies may affect the completion of the internal problems of the country.

Keywords: *Tanzania, international organization, albino, domestic constituencies*

Abstrak

Kasus kekerasan dan pembunuhan Albino di Tanzania menarik perhatian publik domestik maupun internasional. Prosentase Tanzania mencapai 93% terkait budaya kepercayaan witchcraft, kutukan, kekuatan setan dan lain sebagainya. Kuatnya budaya kepercayaan terhadap witchcraft mengakibatkan penerimaan advokasi NGO dan INGO terhalang. Tanzania menempati posisi teratas di kawasan sub Saharan Afrika sebagai negara dengan tingkat pembunuhan Albino paling tinggi. Kondisi tersebut tidak lantas membuat pemerintah Tanzania tinggal diam seperti dilakukannya upaya pemerintah melindungi para Albino dengan meningkatkan keamanan serta keadilan hukum. Tanggapan yang diberikan pemerintah Tanzania dianggap lambat oleh beberapa organisasi internasional maupun organisasi non-pemerintah, sehingga terdapat advokasi dari beberapa organisasi internasional baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk melakukan misi kemanusiaan dan keadilan terhadap Albino. Namun masih saja permasalahan pembunuhan Albino terjadi meski sudah ada advokasi organisasi internasional dan tindakan dari pemerintah

berupa pelarangan dan hukuman terhadap pembunuhan Albino. Merujuk latar belakang masalah yang disampaikan penulis, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah mengapa masih terjadi pembunuhan Albino di Tanzania meski sudah ada advokasi dan peran pemerintah. Penelitian ini menjabarkan sebab masih terjadinya pembunuhan Albino di Tanzania menggunakan sintesis konsep agenda setting, legitimasi, advokasi, dan konstituen domestik. Mensintesis konsep tersebut memperoleh dua jawaban dari pertanyaan penelitian, yaitu: pertama, lemahnya legitimasi internasional terkait isu kekerasan Albino di Tanzania. Kedua, pergerakan pemerintah terhambat oleh adanya kepentingan konstituen domestik.

Oleh karena itu penelitian ini mendeskripsikan upaya – upaya yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi internasional untuk menghentikan kekerasan dan pembunuhan terhadap Albino di Tanzania. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana legitimasi organisasi internasional dan kepentingan konstituen domestik dapat mempengaruhi penyelesaian masalah internal negara.

Kata Kunci: Tanzania, organisasi internasional, albino, konstituen domestik

Negara di kawasan Afrika Timur dengan jumlah populasi Albino terbesar di Sub-saharan Afrika adalah Tanzania. Luas wilayahnya mencapai 945.087 km² dengan jumlah penduduk berkisar 42 juta jiwa. Terdapat 10% dari jumlah penduduk masuk dalam kategori tidak normal—termasuk cacat fisik dan albino. Perbandingan Albino di Tanzania mencapai 1 : 1429 (Luande, 1985). Jumlah Albino di Tanzania empat kali lipat lebih banyak dari rata-rata populasi Albino di Amerika Serikat dan Eropa. Albino merupakan gen bawaan dari salah satu orang tua, dan gen tersebut membuat satu dari empat anak di satu keluarga dengan gen albino akan menjadi pembawa gen tersebut atau bahkan menjadi Albino (The Vision for Tomorrow Foundation, 2016).

Kesadaran masyarakat Tanzania tentang Albino masih sangat rendah, banyak di antara mereka yang belum mengetahui Albino itu seperti apa. Pengetahuan yang rendah mengenai Albino dihubungkan dengan kondisi ekonomi dalam negeri yang berdampak pada kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Begitu pula disebutkan World Bank Group dalam catatan taksiran keuangan Tanzania bahwa pertumbuhan ekonomi akan berhubungan langsung dengan kemiskinan dan ketidakadilan (inequality) (World Bank Group, 2015:1-180). Kemiskinan di Tanzania dihubungkan dengan area pedesaan di mana 70% penduduk Tanzania hidup di

pedesaan. Masyarakat di pedesaan menggantungkan hidupnya dari sektor agrikultur yang kurang bisa berkembang. Sehingga dengan perekonomian yang tidak stabil, banyak penduduk pedesaan tidak bisa mengakses pendidikan serta informasi. Minimnya pendidikan tersebut mengakibatkan pemahaman masyarakat terhadap suatu hal menjadi tidak jelas di mana 50% masyarakat memahami Albino dengan tidak baik (Masanja, 2014:17).

Kesadaran yang kurang dari masyarakat mengenai Albino dipengaruhi pula oleh adanya kepercayaan masyarakat Tanzania bahwa Albino mampu mendatangkan keuntungan dan memberi kekayaan serta adanya transaksi di pasar gelap sehingga Albino diperlakukan secara diskriminatif (Simona, 2004). Albino menderita baik secara fisik maupun emosional karena perburuan anggota tubuh mereka yang banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar bahkan oleh anggota keluarga. Perburuan anggota tubuh People with Albinism (PWA) selanjutnya dijadikan jimat yang diyakini mampu mendatangkan keberuntungan dan memberi kekayaan. Perburuan PWA dilakukan dengan memutilasi tubuh korban hingga membunuh korban.

Kekerasan terhadap Albino di Afrika paling banyak terjadi di Tanzania, al tersebut mendatangkan perhatian internasional baik dari IGO dan NGO

untuk mengatasi atau menanggulangi bentuk pelanggaran. Salah satu INGO yang memberikan perhatian lebih terhadap kasus ini adalah International Federation of Red Cross and Red Crescent (IFRC) yang pada tahun 2007 telah mengungkap 70 dokumen pembunuhan dan 150 dokumen mutilasi terhadap Albino (IFRC, 2009). Dengan mengungkap dokumen-dokumen tersebut, diharapkan advokasi yang dilakukan IFRC dapat menghapus diskriminasi dan miskonsepsi tentang Albino yang terjadi di Tanzania. Advokasi yang dilakukan IFRC antara lain, kampanye melalui media elektronik, seminar, mendirikan beberapa lembaga untuk menampung Albino yang terlantar, mendirikan sekolah untuk memberikan hak pendidikan kepada Albino dan perlindungan dari kejahatan, memberikan bantuan kesehatan serta mengadakan kampanye untuk menghentikan kekerasan dan pembunuhan terhadap Albino.

Disebutkan pula oleh salah satu INGO charity asal Kanada, Under The Same Sun, bahwa Tanzania merupakan negara di kawasan Sub-Sahara Afrika dengan tingkat pembunuhan, mutilasi serta pembongkaran kubur Albino paling tinggi. Pada laporan Under The Same Sun disebutkan bahwa telah terjadi 71 pembunuhan Albino sejak 2006 hingga 2012. Kemudian terjadi penyerangan sebanyak 29 kali dan penggalan kubur sebanyak 17 kali. Jumlah tersebut hanya kasus yang diungkap dan diperoleh informasinya, sementara masih banyak kasus yang belum terungkap. Angka tersebut menduduki posisi tertinggi diantara negara kawasan Afrika lainnya. Para tukang sihir di Tanzania menggunakan anggota tubuh Albino untuk dijadikan ramuan maupun serbuk yang dijual sebagai jimat dan sebagainya. (UTSS, 2012)

Meski pemerintah terkesan lamban dalam menangani kasus ini namun sudah ada payung hukum untuk melindungi para penyandang cacat termasuk Albino yang tertuang dalam International Convention on the

Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities yang dibentuk pada tahun 2006 (UTSS, 2012). Tanzania merupakan anggota yang menandatangani konvensi tersebut pada 30 Maret 2007 dan meratifikasinya pada 10 November 2009 (United Nations Treaty Collections, 2016). Terlebih dalam Undang-undang Tanzania pada tahun 1977 menyebutkan adanya pelarangan sikap diskriminatif pada orang-orang dengan kecacatan. Hingga pada musim semi tahun 2009 Presiden Tanzania Jakaya Kikwete memberikan perintah untuk melakukan pendataan nama-nama orang yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap Albino. Pemerintah juga mulai melakukan kampanye dengan memberikan telepon genggam kepada PWA untuk digunakan saat mereka dalam keadaan darurat atau diserang. Pemerintah juga menangkap para pelaku yang bersalah dan menetapkannya sebagai tersangka, contohnya seorang berkewarganegaraan Kenya yang tertangkap polisi Tanzania sedang melakukan transaksi penjualan tubuh Albino dengan harga \$250.000 atau senilai dengan 3 Milyar rupiah. Kisaran harga yang ditawarkan adalah \$2000 atau senilai dengan 27 juta rupiah untuk potongan tubuh tertentu, sementara penyihir dapat memperoleh \$30000 atau setara dengan 402 juta rupiah jika menjual satu tubuh. Beberapa industri perikanan dan pertambangan tidak ragu-ragu untuk datang ke penyihir dan membeli jimat agar hasil memancing maupun hasil tambang lebih banyak. Pemerintah juga telah menjatuhkan hukuman mati terhadap tujuh orang yang telah membunuh Albino, namun tindakan lanjut dari hukuman tersebut tidak pernah lagi diungkap atau sekedar diinfokan ke publik. (Larson, 2011:1-30)

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas mengenai permasalahan albino di Tanzania serta advokasi OI. Terdapat tiga sudut pandang yang digunakan penulis-penulis sebelumnya, yaitu analisa dari sisi masyarakat Tanzania yang berfokus pada praktik budaya dan kepercayaan,

kemudian dari sisi pemerintah Tanzania dalam menegakkan hukum dan keadilan serta dari sisi OI yang melakukan advokasi terhadap masyarakat Tanzania. Tiga sudut pandang yang dibangun peneliti-peneliti sebelumnya terfokus pada kondisi domestik. Diawali penelitian sebelumnya oleh Ackley tahun 2010 yang menjelaskan bahwa di Tanzania pada awal 1990an Tanzania dihadapkan pada masa transisi dari Ujaama menuju kapitalisme. Banyak terjadi transformasi termasuk masyarakat kolektif yang menjadi lebih individual, perubahan paham sosialisme menjadi neoliberalisme serta adanya fenomena baru yakni ekonomi pasar ghaib dengan menggunakan albino sebagai jimat. Ackley menyimpulkan ada keterkaitan antara sejarah masa lalu dengan peristiwa pembunuhan albino di Tanzania saat ini. Sejarah yang dimaksud adalah masa transisi dari ujaama menuju kapitalisme. (Ackley, 2010)

Lebih lanjut Peter pada tahun 2012 meneliti kegiatan yang dilakukan Under The Same Sun menemukan adanya beberapa alasan mengapa pembunuhan albino di Tanzania terjadi. Pertama, adanya praktik budaya yang berasal dari nenek moyang dan diwariskan turun temurun. Kedua, adanya kepercayaan budaya terhadap albino bahwasanya dapat memberikan kekayaan dengan memotong bagian tubuh tertentu dari albino dan dipopulerkan oleh penyihir. Peter menyebutkan bahwa kepercayaan terhadap ilmu sihir dan praktik budaya yang masih terjadi di Tanzania menjadi salah satu sebab terjadinya pembunuhan terhadap albino. Pembunuhan albino yang terjadi seringkali tidak dilaporkan memiliki beberapa alasan: (1) Tradisi diam atas pembunuhan anak-anak atau bayi dikarenakan anggota keluarga yang melakukan pembunuhan; (2) Data kelahiran dan kematian yang kurang di wilayah pedesaan—di mana pembunuhan terjadi; (3) Rasa takut akan kehilangan bantuan internasional; (4) Ketakutan untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukan; (5) Perasaan takut akan diserang oleh pihak-

pihak tertentu apabila melaporkan kasus pembunuhan; (6) Tidak adanya kebebasan media kesehatan di wilayah terkait, padahal diketahui Tanzania merupakan salah satu negara di Afrika dengan tingkat kebebasan pers terbaik bertolak belakang dengan Tanzania sebagai negara di Afrika dengan tingkat kematian albino paling tinggi. (Ash, 2012)

Peter menambahkan disini bahwa INGO seperti Under The Same Sun mendapatkan tan tangan dalam melakukan advokasinya agar berhasil seperti pertama, penangkapan terhadap pembunuh seringkali diragukan proses peradilannya karena tidak di blow-up di media publik. Kedua, sistem legal masih terbilang cara yang tidak sepadan untuk digunakan melawan kepercayaan terhadap ilmu sihir dan praktik budaya. Ketiga, ketakutan terhadap penyihir menghambat proses investigasi. Keempat, kurangnya dana yang dimiliki oleh INGO sendiri. (Ash, 2012)

Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya banyak mengkaji mengenai alasan-alasan yang lebih melihat pada kondisi domestik mengapa kekerasan terhadap masyarakat Albino berlangsung. Dalam penelitian-penelitian tersebut belum menganalisis pada level internasional. Permasalahan HAM seperti kekerasan terhadap albino membutuhkan tekanan internasional agar isu tersebut mendapatkan perhatian; terlebih lagi kasus-kasus tersebut ada di negara kecil dimana pengaruh kultural masih mendominasi. Selanjutnya, peneliti fokus pada interaksi negara di dalam organisasi internasional untuk menjelaskan mengapa advokasi dan aturan hukum yang telah dibuat tidak cukup untuk mengurangi jumlah kekerasan albino di Tanzania.

Hennida tahun 2015 dalam bukunya, menjelaskan ada dua alasan mengapa negara-negara menggunakan organisasi internasional dalam interaksinya. Dua alasan tersebut adalah fungsi sentralisasi dan independensi dari organisasi internasional. Fungsi

sentralitas, karena organisasi memiliki struktur yang membuat kerja organisasi internasional menjadi lebih efisien. Sedangkan fungsi independensi merujuk pada kemampuan organisasi internasional untuk bertindak sesuai dengan otoritas yang dimilikinya. Xinyuan dalam tulisannya tahun 2005 juga menyebutkan bahwa keikutsertaan sebuah negara dalam organisasi internasional juga berkaitan erat dengan usaha negara tersebut untuk mewujudkan kepentingan politik domestik negaranya, maka suatu negara diwajibkan untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dalam sebuah permasalahan. Martin dalam tulisannya tahun 2009 menambahkan bahwa negara menggunakan organisasi internasional karena dianggap mampu menyelesaikan masalah-masalah terkait koordinasi, membantu dalam perubahan kebijakan di dalam negeri, dan untuk meningkatkan derajat urgensi dari isu yang ada ke level yang lebih tinggi (internasional) (Hennida, 2015). Hal ini penting untuk negara kecil seperti Tanzania dimana koordinasi di level domestik masih lemah sehingga kebijakan yang diambil di dalam negeri sulit untuk dikonsolidasikan, seperti konsolidasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap albino.

Organisasi internasional juga harus memiliki legitimasi untuk melaksanakan dua fungsi tersebut. Legitimasi diperoleh dari negara-negara maupun aktor-aktor hubungan internasional lain yang memberikan persetujuan untuk mengatur dan mengurus isu yang sedang ditangani bersama. Mengutip Hurd tahun 2000, menyebutkan bahwa legitimasi menunjukkan power yang dimiliki organisasi internasional. Oleh karena itu organisasi internasional akan mencari legitimasinya, misalnya saja legitimasi yang diperoleh Dewan Keamanan PBB. OI maupun INGO harus memiliki simbol untuk memperoleh legitimasi. Simbol dalam OI atau INGO merupakan bentuk otoritas sebagai penghargaan, eksistensi dan kepatuhan. Citra mengutip Hurd tahun 2000 bahwasanya simbol-simbol

yang berusaha didapatkan negara dalam dewan keamanan PBB meliputi agenda, keanggotaan, dan keterlibatan dalam pasukan perdamaian PBB. Simbol agenda seringkali dimanfaatkan negara yang berusaha agar isu tertentu bisa dibahas dalam agenda setting PBB. Isu tertentu yang sudah masuk dalam pembahasan agenda setting PBB secara langsung akan terinternasionalisasi, terlebih official agenda yang membahas banyak isu sehingga selalu dibahas dalam setiap sidang berlangsung. (Hennida, 2015)

Banyaknya pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah kekerasan terhadap Albino di Tanzania, tidak segera menyelesaikan permasalahan. Bahkan NGO nasional dan internasional mengalami kendala dalam melaksanakan advokasinya. Keterlibatan organisasi internasional disini adalah tidak lain karena dua fungsi yang dimilikinya yakni, fungsi sentralisasi dan independensi. Fungsi sentralitas, karena organisasi memiliki struktur yang membuat kerja organisasi internasional menjadi lebih efisien. Sedangkan fungsi independensi merujuk pada kemampuan organisasi internasional untuk bertindak sesuai dengan otoritas yang dimilikinya (Hennida, 2015:164-164).

PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi yang berhubungan dengan hak asasi manusia, larangan keras terhadap kekerasan terhadap manusia, anak-anak, dan perempuan. Resolusi regular PBB selalu dikeluarkan setiap tahun sekali seperti agenda setting tahunan. Namun, ada satu waktu jika terdapat situasi yang krusial, akan ada resolusi-resolusi khusus terkait isu atau permasalahan tertentu. Terdapat 70 resolusi pada sesi regular, ada beberapa resolusi yang membahas tentang Hak Asasi Manusia seperti A/RES/67/233 yang dibahas pada 24 Desember 2012 tanpa melalui voting dan membahas tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar. Selanjutnya, A/RES/67/259 dengan status plen (plenary) yang dibahas pada 26 April 2013 membahas mengenai deklarasi politik yang

diharapkan dapat berimbang pada resolusi perdamaian pada konflik – konflik yang terjadi di Afrika. Sudah selayaknya negara yang tergabung dalam negara-negara anggota PBB yang menandatangani dan meratifikasinya melaksanakan dan mematuhi resolusi yang dibuat tersebut. Adapun alasan mengapa terdapat satu atau dua negara yang melenceng dan tidak mematuhi aturan serta tidak melaksanakan resolusi yang sudah ditetapkan PBB yakni, lemahnya legitimasi organisasi internasional dikarenakan tidak memiliki salah satu simbol pentingnya misal, agenda setting. Negara yang pada awalnya berpikir jika permasalahannya akan dibantu menyelesaikan oleh organisasi yang memiliki kuasa lebih besar justru tidak sesuai harapan awal negara tersebut bergabung dengan organisasi internasional. Adanya ketidaksesuaian tersebut membuat komitmen negara yang bergabung untuk mangkir dari aturan dan resolusi-resolusi yang seharusnya dilaksanakan. (General Assembly, 2016)

Pada 31 Januari 2013, seorang bayi laki-laki dengan Albino diserang ketika dia tertidur. Pelaku mengiris dahi, memotong tangan kanan, pundak kiri dan memotong lengan kirinya menggunakan golok. Anak tersebut tidak bias melawan serangan yang datang padanya. Sementara kakeknya yang berusia 95 tahun, dibunuh setelah berusaha menyelamatkan cucunya. Ayah dan nenek korban selamat dengan beberapa luka serius. Informasi yang diperoleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) berasal dari sumber yang beragam dengan verifikasi kasus masing-masing. Sebagian besar kasus, informasi diterima melalui NGO nasional dan internasional yang bekerja untuk promosi dan perlindungan hak PWA, sementara beberapa dikonfirmasi lewat laporan polisi dan putusan pengadilan. (United Nation, General Assembly, 2016)

Isu kekerasan dan pembunuhan terhadap Albino di Tanzania juga

menjadi tantangan bagi organisasi internasional, seperti United Nations (PBB) yang sudah ikut berupaya menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap Albino melalui badan-badan organisasinya. Dewan Umum PBB di sesi sidang ke-23 yang mengadopsi resolusi pertama (HRC (Human Rights Council) resolution 23/13) yang subjeknya tentang kejahatan dan diskriminasi terhadap Albino. Judul resolusi pertama oleh HRC tersebut adalah Attacks and Discrimination Against People with Albinism yang dihasilkan tanpa voting pada 13 Juni 2013. Resolusi tersebut berupaya untuk mendorong negara-negara mengambil langkah yang efektif untuk melindungi PWA, begitu juga dengan keluarganya. Selanjutnya, resolusi 23/13 diharapkan dapat dilaksanakan, kemudian investigasi yang cepat dan efektif terhadap serangan pada Albino dapat membawa pelaku ke pengadilan untuk bertanggung jawab. Hal tersebut tidak lain adalah langkah-langkah efektif yang diambil untuk menghilangkan semua jenis diskriminasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang Albino. (UNESCO, 2016)

Pada tahun 2006, jauh sebelum resolusi-resolusi yang dibuat oleh badan – badan organisasi PBB mengenai Albino, PBB sendiri telah membuat sebuah perjanjian internasional yang lebih dikenal dengan sebutan Convention on the Right of Persons with Disabilities. Perjanjian tersebut diadopsi pada tanggal 13 Desember 2006, selama pembuatan resolusi PBB sesi reguler ke-61, A/RES/61/106 di artikel yang ke-42, yang mana perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh semua negara anggota dan diintegrasikan oleh organisasi-organisasi regional di markas besar PBB di New York pada 30 Maret 2007. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menekankan kembali hak-hak yang sama bagi penyandang cacat untuk ikut andil dalam pembuatan resolusi maupun deklarasi. Selanjutnya, mengulas Charter PBB yang menyebutkan bahwasanya martabat yang melekat pada manusia tidak dapat dilepaskan dari setiap manusia sebagai dasar keadilan,

kebebasan, dan perdamaian dunia. Dijelaskan pula dalam deklarasi umum hak asasi manusia pada artikel 1 bahwa "All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.", maka dari perjanjian ini sekaligus merefleksi beberapa undang-undang dan resolusi kebelakang yang telah dicetuskan sebelumnya untuk pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian perjanjian ini diharapkan dapat menjadi angin segar untuk persamaan hak bagi penyandang cacat kedepannya.

Berangkat dari data – data mengenai kepercayaan sihir yang memicu kekerasan dan pembunuhan terhadap Albino, membuat banyak advokasi dan upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, organisasi lokal dan internasional untuk menghapus kejahatan pada Albino. Data – data tersebut menunjukkan ada tiga faktor penting yang dapat mempengaruhi kasus Albino di Tanzania yakni, masyarakat Tanzania dengan kepercayaan sihir yang masih kuat, advokasi yang dilakukan organisasi lokal, domestik, dan internasional, yang terakhir adalah peran pemerintah sendiri dalam menangani kasus tersebut. Advokasi dan resolusi yang telah dilakukan oleh pemerintah Tanzania, organisasi lokal, organisasi domestik, dan organisasi internasional baik pemerintah maupun non-pemerintah, masih belum dapat menyelesaikan kasus pembunuhan Albino di Tanzania. Salah satu hal diindikasikan menjadi penyebab sulitnya advokasi menembus kasus kekerasan dan kejahatan terhadap Albino adalah masih tingginya kepercayaan masyarakat pada sihir yang ditunjukkan pada riset yang dilakukan Pew Research Center tahun 2010 bahwa Tanzania merupakan negara dengan prosentase paling tinggi dalam kepercayaan terhadap sihir yang mencapai 93%. Tingginya kepercayaan terhadap sihir belum mampu ditembus dindingnya oleh aklamasi nilai internasional terkait pemahaman tentang Albino. Rendahnya pemahaman

masyarakat tentang Albino juga didukung oleh rendahnya pendidikan dan infrastruktur yang masih belum memadai untuk mengakses informasi.

Selama ini pembunuhan terjadi di daerah pedesaan yang mana akses pendidikan masih sangat minim. Pada tahun 2008, Presiden Jakaya Kikwete memberi perintah kepada satuan polisi untuk membagikan telepon genggam pada PWA untuk respon yang lebih cepat apabila terjadi penyerangan terhadap mereka, namun hal tersebut tidak efektif karena ponsel yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah Albino. Pada tahun 2014 juga Presiden Jakaya Kikwete memberikan peringatan untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap Albino. Akan tetapi jumlah anggota kepolisian di pedesaan masih sedikit dan wilayah yang sering terjadi penyerangan terhadap Albino, letaknya sangat terpencil dan akses menuju kesana butuh waktu yang panjang. Adanya halangan tersebut tidak menyurutkan kelompok - kelompok yang ingin menegakkan keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap Albino. Namun, karena budaya kepercayaan terhadap sihir masih tinggi membuat seluruh lapisan masyarakat seolah membenarkan stigma dan diskriminasi yang ditujukan pada Albino. Alhasil, organisasi dan NGO lokal yang memiliki jaringan di luar negara berbagi informasi mengenai isu yang sedang ingin diselesaikan, dan informasi tersebut tersampaikan melalui jaringan organisasi atau NGO internasional. Hal ini kemudian menjadikan permasalahan yang awalnya hanya ada dalam domestik Tanzania, namun karena domestik dirasa tidak mampu menyelesaikan masalah internal negara, maka sudah sepatutnya lembaga internasional yang memiliki power lebih besar membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Tanzania.

Meskipun perjanjian tersebut merupakan prestasi internasional untuk pemenuhan hak-hak individu penyandang cacat, kemungkinan tidak akan seefektif diharapkan. Diperlukan

tindakan lebih lanjut dengan negara-negara anggota baik yang sudah menandatangani ataupun meratifikasi. Oleh karena itu, untuk mencegah prestasi tersebut pudar ke dalam sejarah, dan pemenuhan hak bagi penyandang cacat hanya wacana semata, maka masyarakat internasional harus turut bertindak untuk melaksanakan tujuan dari perjanjian tersebut dibentuk.

Disebutkan sebelumnya apabila derajat legitimasi dipengaruhi oleh agenda dan keterwakilan negara dalam sebuah organisasi. Apabila negara tidak masuk agenda dan tidak mendapat keterwakilan dalam organisasi tersebut, maka kebanyakan negara akan tidak mematuhi. Begitu perjanjian pertama yang membahas tentang hak asasi manusia oleh Albino, memang Tanzania terwakili, namun hanya sebatas itu tidak dalam pelaksanaannya. Pasalnya negara – negara besar belum melaksanakannya, hanya menandatangani dan meratifikasi, sementara Amerika Serikat hanya menandatangani dan tidak meratifikasi. (United Nations Treaty Collections, 2016)

Keikutsertaan NGO dan organisasi internasional dalam penyelesaian permasalahan di Tanzania tidak lain adalah untuk menciptakan perdamaian dunia serta menghapus stigma dan diskriminasi, khususnya kejahatan terhadap Albino. Resolusi demi resolusi sudah di keluarkan oleh PBB melalui badan – badan organisasinya, seperti resolusi A/HRC/23/13, A/HRC/24/33, A/HRC/24/57, A/HRC/28/75, dan A/HRC/28/6, kesemua resolusi tersebut tidak menggunakan voting, sehingga kesadaran negara anggota masih kurang terhadap resolusi yang dibentuk oleh organisasi yang diikutinya. Resolusi – resolusi tersebut masih menekankan pada kejahatan yang dialami PWA, bukan penyebab kenapa PWA diserang dan dibunuh yakni, praktik sihir di Tanzania. Begitu pula perjanjian atas pemenuhan hak – hak penyandang cacat, International Convention on the Protection and Promotion of the Rights

and Dignity of Persons with Disabilities yang dibentuk pada tahun 2006, yang mana Tanzania merupakan salah satu negara yang menandatangani serta meratifikasi perjanjian tersebut. Artinya sudah selayaknya Tanzania mematuhi aturan yang tertulis dalam perjanjian tersebut pada pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya masih terjadi ketidaksesuaian komitmen Tanzania yakni, masih terjadi kekerasan terhadap Albino setelah adanya perjanjian tersebut. Sekali lagi disebutkan bahwasanya adanya sebuah perjanjian tidak lantas menghentikan suatu permasalahan, melainkan dimulai dari kesadaran elemen paling mendasar dalam negara yakni masyarakat untuk bekerjasama memahami pentingnya hak asasi manusia yang mutlak dimiliki oleh individu.

Hal ini tidak hanya adanya kurangnya komitmen internasional melainkan juga komitmen negara yang dipengaruhi oleh konstituen domestik. Konstituen domestik Tanzania yang meliputi pemerintah, partai dominan yakni Chama Cha Mapundizi, kelompok elit, pebisnis lokal, dan publik Tanzania, maka yang sebenarnya mampu memberikan dampak pada penghapusan diskriminasi dan kejahatan terhadap Albino pada sisi domestik adalah pemerintah dan publik Tanzania. Hukum legal yang diberlakukan oleh pemerintah untuk kejahatan serius seperti pembunuhan Albino masih lemah. Bahkan tidak banyak kelanjutan tindak penangkapan yang dilakukan polisi pada penyihir yang terbukti melakukan pembunuhan maupun praktik diungkap ke publik, begitu pula publik yang tidak ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkara tersebut. Pemerintah memberikan hukuman kepada penyihir tertuang dalam undang – undang tentang sihir yang menyebutkan bahwa hukuman minimal pada praktik sihir adalah lima hingga tujuh tahun penjara serta dengan sejumlah denda. Menurut kelompok yang anti terhadap undang – undang sihir menyebut jika hukuman tersebut masih belum tegas, apalagi dilaporkan bahwa ada oknum

pemerintah yang terlibat dalam segi permintaan jimat dari anggota tubuh Albino untuk kepentingan pemilu maka tindakan pemerintah paradoks dengan hukum yang ditetapkannya.

Kemudian ketidaksesuaian komitmen Tanzania pada organisasi internasional yang diikuti adalah karena tidak masuknya negara dalam official agenda PBB dan adanya kepentingan domestik yang mana konstituennya memiliki pengaruh pada setiap sisi kehidupan berbangsa dan bernegara Tanzania. Penulis berpendapat bahwasanya hipotesis yang disebutkan benar dengan disertai data – data dan bukti – bukti tentang lemahnya legitimasi organisasi internasional terkait kekerasan Albino di Tanzania dan adanya keterlibatan pemerintah dalam kaitannya dengan isu kekerasan dan

pembunuhan terhadap Albino di Tanzania.

Publik domestik juga perlu edukasi lebih mengenai pemahaman terhadap Albino. Terlebih kepercayaan yang kuat pada ilmu sihir membuat advokasi yang dilakukan oleh NGO dan organisasi lokal maupun internasional terhambat, karena tidak dapat dipungkiri publik juga mampu mempengaruhi suatu kebijakan yang terbentuk dari opini publik. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya angka kekerasan dan pembunuhan Albino pada tahun 2015. Dengan adanya kesesuaian antara konstituen domestik dan masyarakat serta Albino di Tanzania diharapkan akan meningkatkan keseriusan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi mereka.a.

Daftar Pustaka

- [1] Ackley, Caroline. The fetishization of Albino in Tanzania. University of Chicago, 2010, pp 1-63
- [2] Ash, Peter W. Children with Albinism in Africa: Murder, Mutilation and Violence. In Under The Same Sun report. 2012, pp 1-55
- [3] Hennida, Citra. Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara Kedaulatan, dan Institusi Multilateral. Malang: Intrans Publishing, 2015, pp 1-191
- [4] IFRC. Through albino eyes : The plight of albino people in Africa's Great Lakes region and a Red Cross response. In Advocacy Report. 2009, pp 1-24
- [5] J, Luande, Henschke CI, Mohammed N. The Tanzanian human albino skin Cancer. 1985, pp. 55(8):1823-1828.
- [6] Larson, Stacy (2011). Magic, Mutilation, and Murders: A Case for Granting Asylum to Tanzanian Nationals with Albinism. In Pace International Law Review Online Companion, Vol. 2, No. 8, pp. 30-1. [Online] 16 November 2015 available: <http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=pilronline>
- [7] Masanja, Methusela M., et al. Awareness, Attitude and Level of Albino's Predicament in Tanzania. In Asian Journal of Applied Science and Engineering, 2014, pp 17
- [8] Peter, Ash. (2014) Under The Same Sun. [Online] 12 Februari 2016. Available: <http://www.underthesamesun.com/sites/default/files/About%20Us%20Brochure.pdf>
- [9] Under The Same Sun. Children with Albinism in Africa: Murder Mutilation and Violence. In A Report on Tanzania With parallel references to other parts of Sub-Saharan Africa 2012, pp 1-55 [pdf]
- [10] United Nations. General Assembly: Resolutions adopted by the General Assembly during its twenty-third session. [Online] 17 November 2016, available: www.un.org/documents/ga/res/23/ares23.htm
- [11] United Nations Treaty Collections (2016). 15. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in United Nation, Treaty series, vol. 2515, p.3. [Online] 15 September 2015 Available: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en
- [12] World Bank Group. Tanzania Mainland Poverty Assessment. 2015, pp 1-180 [pdf].